

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinamika agensi perempuan pesisir di Tambak Lorok dalam Pemilihan Wali Kota Semarang 2024 menunjukkan terbentuknya otonomi relasional yang terbatas dan cenderung bersifat pragmatis. Hal ini berakar dari ketimpangan sumber daya (*resources*), khususnya rendahnya pendidikan formal serta dominasi suami dan tokoh lokal sebagai *gatekeeper* informasi politik. Struktur tersebut membentuk arus pengetahuan yang hierarkis dan berimplikasi pada terbatasnya akses perempuan terhadap alternatif wacana (*discursive alternatives*), sehingga perempuan lebih sering berada pada posisi pengikut (*follower*) dalam proses pengambilan keputusan politik. Agensi yang dimanifestasikan di bilik suara, baik berupa kepatuhan terhadap suami maupun keputusan berbasis pertimbangan visual yang spontan, merefleksikan praktik kebajikan strategis (*strategic virtue*). Pilihan tersebut merupakan strategi untuk menjaga harmoni domestik sekaligus merespons imperatif bertahan hidup (*survival imperatives*) di tengah kerentanan ekonomi. Dengan demikian, otonomi politik perempuan pesisir (istri nelayan) Tambak Lorok pada Pilwalkot 2024 ini tidak merepresentasikan kemandirian individual, melainkan otonomi relasional yang bersifat prosedural dan pragmatis. Akibatnya, capaian (*achievements*) yang dihasilkan cenderung bersifat semu. Tingginya tingkat partisipasi administratif di TPS mencerminkan peningkatan efektivitas dalam

peran yang ditentukan (*Increased efficacy in pre-assigned roles*). Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi posisi tawar politik yang substantif untuk memengaruhi kebijakan publik jangka panjang yang relevan bagi kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya merupakan modal penting; otonomi politik yang substantif tidak mungkin lahir dari ruang hampa, melainkan mensyaratkan adanya perluasan akses sumber daya agar perempuan memiliki alternatif wacana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan perbaikan kondisi sosial-politik di tingkat lokal:

- a. Peningkatan literasi politik substantif melalui program yang mendorong perempuan pesisir untuk mengevaluasi janji kampanye dan memahami hak-hak politiknya sebagai warga negara, sehingga partisipasi politik tidak berhenti pada kepatuhan administratif semata.
- b. Penguatan ekonomi perempuan nelayan melalui pelatihan pengolahan hasil laut yang bernilai tambah sebagai upaya meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam pengambilan keputusan politik di tingkat komunitas.

- c. Pembukaan ruang diskusi politik khusus perempuan di tingkat lokal yang lebih inklusif dan aman dari dominasi laki-laki, guna mendorong keberanian perempuan pesisir.
- d. Integrasi isu-isu strategis pesisir ke dalam agenda kebijakan yang berkelanjutan, sehingga suara perempuan dalam proses elektoral dapat dikonversi menjadi klaim politik jangka panjang terhadap negara.